



**Judul** : Pemerintah Didorong Segera Usulkan RUU Sisdiknas  
**Tanggal** : Selasa, 15 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 13

# Pemerintah Didorong Segera Usulkan RUU Sisdiknas

*Kondisi dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan nasional sudah berubah sejak pandemi covid-19 hingga diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.*

**FAUSTINUS NUA**  
[faustinus@mediaindonesia.com](mailto:faustinus@mediaindonesia.com)

**P**EMERINTAH perlu segera mengusulkan RUU Sisdiknas ke DPR RI untuk dimasukkan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini. Pasalnya, RUU Sisdiknas yang dinilai penting ini harus bisa dibahas secara komprehensif sebelum memasuki tahun politik di 2024.

"Hanya karena 14 Februari 2024 itu pemilu, artinya 2023 sudah mulai masa kampanye. Maka sebaiknya RUU Sisdik-

nas ini bila mau diajukan, ya, harus segera pemerintah mengusulkan ke DPR agar masuk dalam daftar prolegnas prioritas lebih dahulu yang disahkan dalam rapat paripurna," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, kemarin.

Politisi PKS itu menegaskan segera mengusulkan, bukan berarti harus buru-buru. Namun, bila pemerintah, sudah menyusunnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan.

"Jangan lupa menerapkan lima asas penyusunan (per-

encanaan) sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yakni *bottom up* (dari bawah), *top down* (berdasar rencana pembangunan jangka pendek atau menengah (RPIP/RPJM), partisipatif (semua elemen pendidikan) teknokratik (sesuai regulasi yang ada). Baru kemudian dibawa ke DPR untuk memenuhi asas kelima, yakni politik, supaya dibahas di DPR," jelasnya.

Diungkapkan bahwa revisi UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebenarnya sudah masuk daftar prolegnas jangka panjang, tetapi belum masuk Prolegnas Prioritas 2022. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan naskah akademik hingga draf RUU-nya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo

Pareira menilai bawa RUU Sisdiknas memang penting untuk masuk prolegnas. Perubahan dan perkembangan yang terjadi merupakan dasar penting untuk menyesuaikan. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemendikbud-Ristek menyampaikan bahwa RUU Sisdiknas ditargetkan bisa masuk prolegnas pada Mei 2022. Pentingnya pelibatan publik dalam penyusunan atau revisi UU Sisdiknas tersebut juga diingatkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, kemarin.

"Ada proses penting yang sedang berjalan saat ini, yaitu penyusunan revisi UU Sisdiknas yang diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu meningkatkan daya saing anak bangsa di masa datang," kata Rerie, sapaan akrab Lestari.

Menurut anggota Majelis

Tinggi Partai NasDem itu, kecermatan dalam penyusunan revisi tersebut juga merupakan hal yang sangat penting agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi di lapangan.

## Dibatasi

Sikap kritis disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang meminta Kemendikbud-Ristek lebih fokus pada masalah pendidikan di masa pandemi dan pascapandemi. Menurut Wasekjen PGRI Dudung Abdul Qodir, kemarin, draf RUU Sisdiknas yang dibahas tidak lebih baik dengan yang sudah ada.

Dia menambahkan, pada saat uji publik pada 10 Februari 2022, PB PGRI bersama organisasi profesi lain hanya diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan pikiran dan usulan.

"Ini namanya *forum group discussion* (FGD). Uji publik harusnya ada standar dan dialog terstruktur dan progres dari masukan. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah wajib melibatkan publik mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan," jelasnya. (H-1)